

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN
TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs)
DALAM UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
(Studi Terhadap Penanaman Modal Asing)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



DISUSUN OLEH:

HELNA PEBRUWENTI
NIM : 10727000217

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Perjanjian TRIMs timbul sebagai reaksi terhadap meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang berkembang. Indonesia telah mengikatkan dirinya didalam organisasi perdagangan dunia WTO, sehingga segala kewajiban yang disepakati dalam wadah organisasi tersebut menjadi kewajiban Indonesia untuk melaksanakannya. Khusus untuk kebijakan penanaman modal, maka Indonesia dalam menetapkan kebijakannya harus disesuaikan dengan aturan-aturan dalam TRIMs. Pasal 12 UUPM mengandung perlakuan yang berbeda antara PMDN dan PMA dan pasal 18 UUPM memuat tentang pemberian insentif yang didasarkan pada persyaratan. Hal ini merupakan hal yang dilarang oleh WTO yang dituangkan dalam perjanjian TRIMs.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penanaman modal asing menurut TRIMs dan untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan TRIMs dalam UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data dianalisa secara normatif-kualitatif yaitu analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini.

Pengaturan penanaman modal menurut TRIMs pada prinsipnya melarang *performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang tidak sesuai dengan pasal III GATT tentang Perlakuan Nasional dan pasal XI GATT tentang Pembatasan Kuantitatif dalam peraturan penanaman modal, yaitu persyaratan menggunakan kandungan lokal (*Local Content Requirement*) dan persyaratan keseimbangan (*Trade Balancing Requirement*).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs. Aturan-aturan TRIMs tentang upaya-upaya perdagangan dan penanaman modal telah diterapkan dalam UU NO 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 18 ayat (3) huruf j Undang-Undang Penanaman modal dalam hal ini dapat dikecualikan mengingat syarat diskriminasi tersebut dilakukan tidak secara spesifik dan hanya merupakan suatu pilihan bukan suatu keharusan yang memaksa untuk dilakukan. Setiap negara anggota memiliki kekuasaan untuk mengatur pelaksanaan dalam kegiatan penanaman modalnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional seperti WTO dan TRIMs.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL	
ASING	15
A. Pengertian Penanaman Modal Asing.....	15
B. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing	16
C. Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing	18
D. Bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha	20
 BAB III TINJAUAN UMUM TRIMs	23
A. Pengertian TRIMs	23
B. Prinsip-Prinsip TRIMs	24
C. Tujuan TRIMs	32
D. Arti Penting TRIMs	33

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN TRIMs DALAM UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ...	37
A. Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut TRIMs	37
1. Penanaman Modal Yang Terkait Perdagangan	37
2. Perjanjian WTO Mengenai TRIMs	44
B. Penerapan aturan TRIMs Dalam UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	60
1. Perlakuan Sama Terhadap Penanaman Modal di Indonesia .	65
2. Perlakuan Khusus Terhadap Negara-Negara Tertentu.....	67
3. Daftar Investasi Negatif	69
4. Fasilitas Penanaman Modal	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang khususnya dibidang ekonomi, karena hal ini merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan membutuhkan modal, keterampilan dan teknologi, yang akan lebih ideal lagi jika pemenuhan kebutuhan pembangunan ini dapat disediakan melalui sumber dalam negeri. Namun kenyataannya akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, keterampilan serta penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan yang diharapkan.

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri (penanaman modal) dengan cara modal yang berasal dari masyarakat umum dimobilisasikan secara maksimal.¹

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.²

¹ Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 6.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.³ Selain itu penanaman modal asing diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.⁴ Penanaman modal diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam pemecahan masalah lapangan pekerjaan.⁵

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Politik

Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal terutama penanaman modal asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Faktor politik dan faktor ekonomi akan saling

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, *Lembaran Negara RI*. Tahun 2007 No. 67, *Tambahan Lembaran Negara* No. 4724, Pasal 1 ayat (1).

³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 35.

⁴ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing*, (Bandung: Bina Cipta, 1970), Cet. ke-1 h.1.

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.185.

mempengaruhi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Dengan demikian apabila perekonomian suatu negara sangat mengkhawatirkan tentunya para investor akan sangat khawatir menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari ekonomi, aspek moneter juga sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya.

3. Faktor Hukum

Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*), dan efisiensi (*efficiency*).⁶

Indonesia perlu tampil dengan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi peningkatan gairah berinvestasi dalam upaya untuk merebut perhatian investor. Kewajiban pemerintah untuk merajut kebijakan seramah mungkin kepada

⁶ Dhaniswara K.Harjono, *op cit.*, h. 8.

investor, dimana kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh pemerintah harus mampu meningkatkan mobilitas investasi yang sangat tinggi.⁷

Kebijakan-kebijakan penanaman modal tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip penanaman modal Internasional dalam *World Trade Organization* (WTO)⁸. WTO yang merupakan organisasi perdagangan Internasional, berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan perdagangan antara negara anggota sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain, dan persaingan yang tidak sehat antar negara.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan perekonomian negara menganggap WTO sebagai salah satu wadah yang tepat terutama dalam menjalankan hubungan perdagangan Internasional yang baik dan menguntungkan. Hal ini dibuktikan pada tahun 1995, Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO dan telah meratifikasi kesepakatan pendirian WTO berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 02 November 1994.⁹ Karena Indonesia telah mengikatkan dirinya didalam organisasi tersebut sehingga segala kewajiban yang disepakati dalam wadah WTO, menjadi kewajiban Indonesia untuk melaksanakannya. Khusus untuk kebijakan penanaman modal, maka Indonesia dalam menetapkan kebijakannya harus disesuaikan dengan aturan-

⁷ *Ibid.* h. 284.

⁸ *World Trade Organization* untuk selanjutnya disingkat dengan WTO

⁹ Mahmul Siregar, *UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal*, (2002) 1 : 3, Jurnal Hukum Bisnis, h. 26.

aturan dalam *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)¹⁰, atau upaya-upaya investasi yang terkait dengan perdagangan.¹¹

Indonesia meratifikasi perjanjian TRIMs berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang termuat dalam Lampiran 1A ayat (7) Undang-Undang tersebut. Karena suatu Perjanjian Perdagangan Internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya, ketika suatu negara telah meratifikasinya, maka negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya kedalam aturan hukum nasionalnya.¹²

Di Indonesia, Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.¹³

Perjanjian WTO termasuk perjanjian TRIMs ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marakes, Maroko dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.¹⁴ Namun, Indonesia baru menerapkan aturan-aturan TRIMs dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal karena adanya perlakuan khusus (*special and differential treatment*) bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam WTO umumnya dalam bentuk masa transisi yang lebih

¹⁰ *Trade Related Investment Measures* untuk selanjutnya disingkat TRIMs.

¹¹ Dhaniswara K.Harjono, *loc.cit.*

¹² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 78.

¹³ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2007), h .1.

¹⁴ *Ibid.* h. 236.

lama daripada negara maju dalam mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian WTO.¹⁵

Perjanjian TRIMs timbul sebagai reaksi terhadap semakin meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang berkembang yang menganggap upaya-upaya atau kebijakan penanaman modal tersebut telah mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan internasional.¹⁶

Ketentuan TRIMs hanya memuat 9 (sembilan) pasal ditambah daftar ilustrasi TRIMs. Teks perjanjian TRIMs memuat upaya-upaya penanaman modal yang dilarang, jangka waktu transisi untuk negara-negara anggota untuk menghapus praktik-praktik yang dilarang. Perjanjian tersebut juga mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Perjanjian membolehkan negara berkembang untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian untuk sementara waktu. Perjanjian juga memuat suatu ketentuan untuk meninjau kembali muatan TRIMs.¹⁷

TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)¹⁸. Pasal 1 TRIMs menyatakan:

*“This agreement applies to measures related to trade in goods only referred to in this agreement as “TRIMs”.*¹⁹

¹⁵ *Ibid.* h. 237.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* h. 106.

¹⁸ *General Agreement on Tariffs and Trade* untuk selanjutnya disingkat GATT.

Menurut Erman Radjagukguk, pasal 1 ini memiliki 2 (dua) alternatif, pertama, bahwa TRIMs berhubungan dengan perdagangan barang dan kedua, TRIMs meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai akibat penyimpangan dari prinsip GATT dan merugikan perdagangan barang. Sementara pengertian kedua hal tersebut adalah mengurangi atau menghapus segala kebijakan investasi yang menghambat kegiatan perdagangan dan kebebasan kegiatan investasi dan menghapus aturan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat perdagangan barang dagang pada TRIMs yang diidentifikasi. Pasal 2 TRIMS mengatur prinsip “*National Treatment*” dan “*Qualitative Restrictions*”, yang berbunyi:

“*Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply by TRIMs that is inconsistent with the provisions of Article XI of GATT 1994.*”²⁰

Pasal III GATT berhubungan dengan “*National Treatment*” di bidang perpajakan dalam negeri dan Pasal XI berhubungan dengan larangan umum pembatasan kuantitatif. Kedua pasal tersebut berhubungan dengan pemakaian instrumen tersebut untuk melakukan diskriminasi barang-barang impor, melarang perdagangan internasional atau melindungi produksi lokal. Pasal III menyatakan dengan jelas berhubungan dengan barang-barang impor dan barang dalam negeri. Pasal XI GATT mengeliminasi penggunaan pembatasan kuantitatif, bergantung kepada pengecualian yang tercantum dalam pasal tersebut. Bila dibaca dengan

¹⁹ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, cet. II, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998), h. 226.

²⁰ *Ibid.*

cermat, Pasal III GATT sepertinya tiba pada kesimpulan bahwa pasal ini ingin melarang atau mengeliminasi peraturan pajak, pungutan, hukum peraturan dan pembatasan kuantitatif yang dimaksudkan untuk merugikan produk luar negeri atau melindungi produk lokal. TRIMs berkaitan kepada Pasal III, sebab peraturan-peraturan tersebut di atas menyimpang dan merugikan perdagangan internasional mengenai barang. Inilah sebabnya mengapa TRIMs diletakkan di dalam kerangka hukum dari GATT. Dapat dikatakan bahwa Pasal III GATT melarang negara-negara anggota menyimpang dari *National Treatment* pada saat menerapkan pajak dalam negeri, pungutan, undang-undang, peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban untuk memproduksi, menjual, mengangkut, mendistribusikan, atau memakai produk dalam negeri atau produk impor.

Kesesuaian dari Undang-Undang Penanaman Modal dengan TRIMs merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh tiap negara anggota. Indonesia sebagai negara berkembang kadangkala masih menerapkan kebijakan-kebijakan perdagangan yang proteksionis, dimana dimaksudkan untuk melindungi pengusaha dalam negeri dari persaingan dengan perusahaan-perusahaan asing di dunia. Secara umum tidak ada ketentuan perdagangan internasional yang melarang pemberlakuan insentif investasi berupa fasilitas penanaman modal. Akan tetapi, masalah dapat timbul apabila pemberian insentif investasi dikaitkan dengan *Performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang bertentangan dengan perjanjian TRIMs.²¹

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan:

²¹ Website Legalitas; <http://www.legalitas.org>. (Terakhir dikunjungi tanggal 15 Des 2010)

- (1) : “Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal”.
- (2) : “Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal yang :
- a. Melakukan perluasan usaha
 - b. Melakukan penanaman modal baru
- (3) : “Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria huruf j yaitu Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri”.

Pasal 18 ayat (30) huruf j tersebut mengkaitkan fasilitas penanaman modal yang demikian dapat berdampak pada perdagangan internasional, karena pemberian fasilitas tersebut didasarkan pada syarat yang dapat berakibat pada perbedaan perlakuan antara barang buatan dalam negeri dengan barang impor.²² Larangan pengaturan kebijakan diskriminasi terkait dengan penggunaan produksi lokal dalam TRIMs, diatur sebagai kegiatan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan kemudahan atau insentif.²³

Pasal 4 ayat (2) UUPM menyebutkan :

“Pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”.

Pasal 12 UUPM menyebutkan :

²² Mahmul Siregar, *loc.cit.*,

²³ H.S.Kartadjoemena, *loc.cit.*,

- (1) “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”.
- (2) “Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah :
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
 - b. Usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pasal 12 UUPM mengandung perlakuan yang berbeda antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Hal tersebut dapat saja mendapat perhatian dari investor asing. Dengan adanya permasalahan atau fakta hukum diatas, negara Indonesia tidak sungguh-sungguh atau tidak sepenuh hati menerapkan aturan TRIMs dalam UUPM, hal tersebut yang melatarbelakangi dan yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :”**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN *TRADE RELATED INVESMENT MEASURES* (TRIMs) DALAM UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (Studi Terhadap Penanaman Modal Asing).**”

B. PERMASALAHAN

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada tinjauan yuridis pemenuhan TRIMs dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Studi Terhadap Penanaman Modal Asing).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal asing menurut TRIMs?
2. Bagaimana penerapan aturan TRIMs di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan Penanaman Modal Asing menurut TRIMs.
- b. Untuk mengetahui penerapan aturan TRIMs didalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan hukum sekaligus sebagai bahan rujukan dalam wahana pengetahuan yang berkaitan dengan hukum.
- b. Sebagai informasi dasar dan perbandingan bagi penulis berikutnya yang menulis mengenai hukum penanaman modal.
- c. Penelitian ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan proposal skripsi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana hukum memandang aturan TRIMs yang diterapkan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder²⁴. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer, yaitu data yang mengikat. Mengikat yang dimaksud adalah karena penelitian ini menyangkut aturan TRIMs dan penanaman modal asing, maka penulis mengkajinya berdasarkan perjanjian TRIMs dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Bahan hukum sekunder adalah data-data yang memberikan penjelasan mengenai data primer berupa perundangan, buku-buku, teori-teori atau pendapat-pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan pokok diantaranya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Hukum Investasi di Indonesia, Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO, Hukum Ekonomi Internasional, dll.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009), ed-11, h.24.

3. Bahan hukum tertier adalah data-data yang mendukung terhadap data primer dan data sekunder berupa kamus maupun website.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-kualitatif yaitu analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Deduktif yaitu analisa dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisa dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat khusus dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif yaitu analisa dengan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai pemenuhan TRIMs dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : Tinjauan umum tentang penanaman modal asing terdiri atas pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk penanaman modal asing, bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha penanaman modal asing.
- BAB III : Tinjauan umum tentang TRIMs terdiri atas pengertian TRIMs, prinsip-prinsip , tujuan dan arti penting perjanjian TRIMs.
- BAB IV : Tinjauan Yuridis Pemenuhan TRIMs Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Terhadap Penanaman Modal Asing) terdiri atas pengaturan penanaman modal asing menurut TRIMs dan penerapan aturan TRIMs dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

A. Pengertian Penanaman Modal Asing

Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *foreign investment*.²⁵ Pengertian penanaman modal asing dapat kita baca dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal asing adalah :

“kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.²⁶

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan.²⁷

1. Modal asing sepenuhnya; dan atau
2. Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing

²⁵ Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2007), h.7.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 1 butir 1.

²⁷ Salim Hs, Budi Sutrisno, *loc.cit.*,

maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%.²⁸

M.Sornarajah²⁹ memberikan definisi tentang penanaman modal asing sebagai berikut:

“penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian”.³⁰

Dalam definisi ini, Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya adalah mendapat keuntungan.³¹

B. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Sornarajah adalah Profesor pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Singapura dan Universitas Malaya Kuala Lumpur.

³⁰ Salim HS, Budi Sutrisno, *op.cit.*, h.149.

³¹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terdiri atas 18 bab dan 40 pasal, mengatur dua macam investasi yaitu investasi asing dan investasi domestik. Ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungannya dengan investasi asing terdiri atas:³²

1. Pasal 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang pengertian penanaman modal asing, penanam modal asing dan modal asing;
2. Pasal 3 tentang asas dan tujuan penanaman modal;
3. Pasal 4 tentang kebijakan dasar penanaman modal;
4. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang bentuk badan usaha;
5. Pasal 6 tentang perlakuan terhadap penanaman modal;
6. Pasal 7 tentang pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak;
7. Pasal 8 tentang kebebasan mengalihkan aset;
8. Pasal 9 tentang tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal;
9. Pasal 10 tentang pengguna tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing;
10. Pasal 11 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
11. Pasal 12 tentang bidang usaha;
12. Pasal 15 sampai dengan pasal 17 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
13. Pasal 18 sampai dengan pasal 24 tentang fasilitas penanaman modal;
14. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang penyelesaian sengketa; dan

³² *Ibid.*

15. Pasal 33 sampai dengan pasal 34 tentang sanksi.

C. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 5 ayat (2) menyatakan:

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.³³

Ayat (3) menyatakan:

Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Dalam pasal 5 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa PMA harus mempunyai badan usaha yang berbadan hukum, hal ini dikarenakan menyangkut dengan eksistensi perseroan terbatas (PT)³⁵ sebagai subyek hukum yang mandiri. Artinya PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Berkaitan dengan pranata hukum PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum, mempunyai ciri tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya yakni PT mempunyai kekayaan sendiri

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 5 ayat(2).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disingkat PT.

terlepas dari pemilik (pemegang saham); berhak menuntut dan dituntut di pengadilan, dan didirikan berdasarkan perjanjian.³⁶

Dari penjelasan diatas, kiranya dapat dikemukakan disini, apa pun bentuk usaha yang dipilih oleh para calon investor, kegiatan usahanya dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi hukum, segala aktivitas yang dilakukan oleh investor harus mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini dirasakan betapa pentingnya harmonisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya agar tidak saling berbenturan. Dilihat dari sudut pandang ini adalah beralasan, jika berbagai pihak mengharapkan undang-undang penanaman modal dijadikan sebagai ketentuan hukum yang khusus (*lex specialis*) dalam bidang investasi.

Namun terlepas dari ini semua, bila dicermati secara seksama apa yang dijabarkan dalam ketentuan UUPM, tampak bahwa bagi penanaman modal yang menggunakan jalur Penanaman Modal Asing, UUPM dengan jelas mengemukakan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Untuk mendirikan badan usaha berbentuk PT menurut UU No. 40 Tahun 2007, harus memenuhi syarat tertentu. Tepatnya dalam pasal 7 UUPT dijelaskan sebagai berikut:

- (1): perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.³⁷
- (2): perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

³⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1).

hukum perseroan. Untuk mendapatkan pengesahan status PT sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendiri harus mengajukan permohonan. Dalam permohonan tersebut, sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan tempat kedudukan perseroan, b. jangka waktu berdirinya perseroan, c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, e. alamat lengkap perseroan.

D. Bentuk Hukum, Kedudukan Dan Daerah Berusaha

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Secara lengkap bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”³⁸

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi:

1. Bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan terbatas (PT);
2. Didasarkan pada hukum Indonesia;
3. Berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 5 ayat (2).

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 1995. Pengertian perseroan terbatas diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³⁹

Ciri-ciri suatu perseroan terbatas disebut sebagai badan hukum, yaitu:

1. Didirikan berdasarkan perjanjian;
2. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham;
3. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian didepan notaris tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum ke luar, tetapi perseroan itu harus disahkan akte pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI.⁴⁰

Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi perseroan terbatas adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum domestik. Kerja sama antara badan hukum asing dengan badan hukum

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit.*, Pasal 1.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, h. 135.

domestik dituangkan dalam kontrak kerja sama.⁴¹ Dalam kontrak ini diatur tentang pembagian saham. Pihak asing dapat memiliki saham maksimal 95% dan domestik, minimal 5%. Dari kerja sama ini akan membentuk badan hukum baru yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik.⁴²

⁴¹ Salim HS, Budi Sutrisno, *op.cit.*, h.167.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRIMs

A. Pengertian TRIMs

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan.⁴³ Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.⁴⁴ Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994.⁴⁵ GATT merupakan suatu kesepakatan internasional yang dibentuk pada tahun 1994 yang memuat ketentuan umum perjanjian multilateral yang mengatur dasar hubungan antar negara dalam melakukan perdagangan internasional serta bagaimana suatu negara mengatur kebijakan perdagangan dalam negeri yang tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam kesepakatan GATT tersebut. WTO atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur

⁴³ Riyanto Astim, *World Trade Organization*, (Bandung: YAPEMBO, 2003), Cet. 1, h. 1.

⁴⁴ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional, (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. 1, hlm. 97.

⁴⁵ H.S. Kartadjoemena, *loc.cit.*,

melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁴⁶ Oleh sebab itu, apapun alasannya, cepat atau lambat, kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Konvensi Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.

B. Prinsip-Prinsip TRIMs

Berikut adalah beberapa prinsip TRIMs dalam kerangka WTO dan GATT, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip *National Treatment*

Prinsip “*National Treatment*” dalam TRIMs adalah bahwa tidak ada tindakan diskriminasi bagi penanam modal di negara-negara anggota. Semua negara pengekspor modal memandang sangat penting aturan dasar perlakuan nasional ini.⁴⁷

Prinsip ini mengharuskan negara tuan rumah untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam

⁴⁶ Mahmud Siregar, *loc.cit.*,

⁴⁷ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, *op.cit.*, h. 168.

negeri di negara tuan rumah tersebut.⁴⁸ Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diberlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya dan berlaku pula terhadap perundang-undangan pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksialisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.⁴⁹

Di lain pihak sebenarnya beberapa negara sedang berkembang melihat dan menyadari adanya perbedaan-perbedaan cukup besar dalam tingkat modal dan teknologi antara perusahaan nasionalnya dengan investor asing. Karena itulah negara-negara sedang berkembang berupaya membatasi ruang lingkup aturan dasar perlakuan nasional ini. Jalan tengah yang acapkali ditempuh dengan adanya dua kepentingan ini adalah biasanya negara-negara tersebut menetapkan bidang-bidang ekonomi tertentu yang tertutup dan bidang-bidang yang terbuka bagi modal asing.

Hakim Mosler, hakim Mahkamah Internasional menjelaskan unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip “*National Treatment*” adalah:

- a) Adanya kepentingan dari suatu negara;

⁴⁸ Dhaniswara K. Harjono, *op.cit.*, h. 110.

⁴⁹ *Ibid.*

- b) Kepentingan tersebut terletak di wilayah dan termasuk yuridiksi suatu negara;
- c) Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya;
- d) Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain. Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota GATT/WTO menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri.

Dengan kata lain negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk impor yang sama buatan dalam negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionis sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

Dengan demikian bahwa prinsip ini menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang ditujukan sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Tindakan yang demikian ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara barang-barang buatan dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi. Dengan persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri, maka terjadi perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sedangkan bagi konsumen hal ini akan lebih menguntungkan karena memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih menguntungkan karena memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. Dalam perspektif lain disebutkan bahwa justru tindakan yang demikian dapat menyebabkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya, karena berkurangnya keleluasan investor untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih bebas.

2. Prinsip Most Favoured Nation (MFN)

Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara tuan rumah terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing lainnya yang melakukan aktifitas penanaman modal di negara dimana penanaman modal tersebut dilakukan.⁵⁰

⁵⁰ Dhaniswara K. Harjono., *op. cit.*, h. 110.

Menurut prinsip ini, bahwa suatu kebijakan penanaman modal dan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Prinsip ini mewajibkan semua negara anggota WTO untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dilakukan segera dan tanpa syarat. Oleh karena itu sebuah negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.⁵¹

Pelaksanaan prinsip MFN dapat dikecualikan berdasarkan pada aturan dalam GATT, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang. Pengecualian atau penanggalan (*waiver*) terhadap prinsip MFN dalam GATT berdasarkan Pasal XXIV. Pengecualian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Anggota-anggota GATT yang membentuk *Free Trade Area* (perdagangan bebas) yang memenuhi persyaratan Pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Negara-negara yang membentuk pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak memenuhi persyaratan Pasal XXIV, dapat membentuk pengecualian dengan menggunakan alasan penanggalan (*waiver*) terhadap ketentuan

⁵¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 109.

GATT. Penanggalan ini dapat dilakukan atau diminta oleh suatu negara anggota, memohon pengecualian dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh GATT ketika ekonominya atau keadaan perdagangannya dalam keadaan sulit.

- b. Pembentukan *Custom Union* (negara tetangga atau sesama negara anggota persatuan pabean), yang merupakan kesepakatan antara beberapa negara dengan batas-batas wilayah tertentu untuk memberikan keistimewaan berupa pembebasan bea masuk terhadap barang-barang impor dari negara-negara yang bergabung.
- c. Adanya perjanjian yang dikemudian hari akan berakibat pada adanya pembentukan *Custom Union* maupun *Free Trade Area*.
- d. Pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung melalui sistem preferensi umum.
- e. Negara memperoleh keuntungan dikarenakan adanya jarak lalu lintas.⁵²

MFN merupakan prinsip dasar WTO yang mengatur tentang perlakuan adil dalam perdagangan internasional. Rasionalisme dari pengaturan tentang MFN didalam GATT 1994, adalah bila seluruh negara anggota menerapkan hal yang sama didalam perdagangan dalam jangka

⁵² *Ibid.* h. 110.

panjang maka hal tersebut akan menciptakan efisiensi dari sumber daya yang diperlukan dalam perdagangan.⁵³

3. Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif (*Quantitatif Restrictions*)

Prinsip ini melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun, seperti penetapan kuota impor dan ekspor dan pembatasan penggunaan lisensi impor atau ekspor. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.⁵⁴

Paragraf 2 ilustrasi dari perjanjian TRIMs dalam pelarangan pembatasan kuantitatif hanya mengacu pada Pasal XI (1) GATT 1994, yang melarang tiga bentuk kegiatan yaitu politik keseimbangan perdagangan (*trade balancing policies*), pembatasan impor (*foreign exchange restriction*), dan pembatasan ekspor (*export restriction*). Namun demikian TRIMs juga memberikan pengecualian dalam penerapan ketentuan perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dan adanya larangan pembatasan kuantitatif, yaitu dalam hal: Pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor; Kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri dan terancamnya produksi dalam negeri; Ketiga, untuk melindungi neraca pembayaran.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* h. 115.

Bagi kepentingan negara berkembang, GATT menyelenggarakan konsultasi secara regular yang diadakan dengan negara yang mengajukan pembatasan impor untuk melindungi neraca pembayarannya.

4. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif

Pada dasarnya GATT membolehkan tindakan perlindungan terhadap industri lokal melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya perdagangan lainnya. Negara-negara anggota pada umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Namun, meskipun diperbolehkan atau pengenaan tarif tidak boleh diskriminatif.⁵⁵

5. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini merupakan fundamental dalam GATT yang berlaku dalam perundingan-perundingan melalui tarif yang didasarkan atas timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

6. Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang

Sebagian negara-negara anggota GATT adalah negara-negara sedang berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Keputusan akhir dalam Putaran Tokyo 1979 menyatakan pemberian yang lebih menguntungkan dan partisipasi yang lebih bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dunia. Dengan adanya

⁵⁵ *Ibid.* h. 114.

keputusan tersebut terdapat pengakuan bahwa negara sedang berkembang juga adalah pelaku yang permanen dalam sistem perdagangan dunia.⁵⁶

C. Tujuan TRIMs

TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan.⁵⁷ Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. Tujuan di aturnya masalah penanaman modal di dalam WTO disebutkan dalam bagian konsiderans dari TRIMs yang meliputi:⁵⁸

- a) Kebijakan penanaman modal yang diterapkan oleh negara anggota WTO yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan;
- b) Penyesuaian dengan pengaturan tentang pembatasan perdagangan yang terdapat didalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1994;
- c) Meningkatkan kebijakan penanaman modal asing yang mendukung perdagangan bebas;
- d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara anggota.

Secara umum TRIMs, melarang kebijakan penanaman modal yang dilakukan tidak sesuai dengan GATT 1994 khususnya yang di atur didalam Pasal III dan XI GATT 1994. Dalam lampiran TRIMs terdapat daftar yang memuat

⁵⁶ *Ibid.* h. 117.

⁵⁷ Munir Fuady, *loc.cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

kebijakan penanaman modal yang dilarang dilakukan yang antara lain mencakup yang memaksakan agar penanam modal asing menggunakan barang lokal dalam persentase tertentu, atau memaksakan untuk mengekspor sebagian barang tertentu dari barang produksinya.⁵⁹

D. Arti Penting Perjanjian TRIMS

Dimasukkannya penanaman modal dalam perjanjian WTO merupakan hasil yang mendasar belum pernah ada aturan atau perjanjian yang sebelumnya memuat penanaman modal dikaitkan dengan perdagangan. Perjanjian penanaman modal (TRIMs) juga merupakan suatu aturan baru yang mengikat mayoritas negara di dunia.⁶⁰ Berlakunya perjanjian ini untuk pertama kalinya memperkuat asumsi dalam kenyataan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perdagangan dan penanaman modal.

Berhasilnya perundingan mengenai penanaman modal dalam Putaran Uruguay ini telah menciptakan suatu lembaga baru, yaitu WTO dengan badan khususnya "*Committee on TRIMs*". Badan khusus ini bertugas mengawasi dan menjamin liberalisasi penanaman modal asing secara langsung. Hal ini merupakan sumbangan penting bagi perkembangan hukum internasional di bidang penanaman modal. Seperti diketahui sebelum tahun 1995 belum ada lembaga internasional yang menangani secara khusus masalah TRIMs. Selain itu pula, peran WTO mengenai masalah ini memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa-sengketa diantara negara anggota apabila salah

⁵⁹ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, Ed.4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, 2006), h. 44.

⁶⁰ Huala Adolf, *op.cit.*,

satu anggotanya melanggar perjanjian TRIMs atau komitmen di bidang penanaman modalnya.⁶¹

Sebelumnya terdapat argumen mengenai tidak adanya lembaga internasional yang menangani masalah penanaman modal asing secara langsung. Ada yang berpendapat, WTO bukanlah lembaga yang tepat menangani masalah penanaman modal multilateral. Alasannya adalah karena terdapatnya pandangan yang berbeda mengenai muatan standar-standar substantif yang akan diatur dalam Perjanjian TRIMs. Argumentasi tersebut ada benarnya, tetapi argumennya lemah. Eksistensi lembaga atau forum akan sangat berperan dalam menangani masalah-masalah perbedaan pendapat dan aturan standar substantif di antara negara anggotanya. Oleh karena itu pembentukan dan keberadaan WTO tidak saja akan menangani masalah aturan penanaman modal tetapi juga dalam jangka panjang akan memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati akan dihormati dan ditegakkan.

Perjanjian TRIMs memberikan sumbangan penting terhadap pembangunan hukum internasional di masa depan di bidang penanaman modal. Karena itu perjanjian TRIMs, meskipun aturannya singkat dan sederhana, namun perjanjian tersebut sebenarnya membuka jalan lebih lanjut mengenai pembahasan aturan substantif yang lebih komprehensif di masa depan.⁶²

Perjanjian TRIMs membantu negara anggotanya lebih transparansi dalam kebijakan hukum penanaman modalnya. Hal ini akan membentuk suatu kondisi

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* h.125.

yang lebih terbuka dan mempunyai kepastian hukum bagi investor asing untuk melakukan usahanya di negara anggota WTO lainnya.⁶³

Perjanjian TRIMs juga memberi ketentuan yang berimbang di antara kepentingan negara maju dan sedang berkembang (dalam hal kebijakan penanaman modalnya). Perjanjian ini dipandang dari sudut kepentingan negara sedang berkembang memberikan keleluasan kepada negara yang sedang berkembang untuk melaksanakan perjanjian. Perjanjian mensyaratkan 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun bagi negara sedang berkembang dan negara miskin untuk dapat melaksanakan perjanjian secara penuh. Perjanjian yang memberikan jangka waktu transisi ini menunjukkan bahwa WTO mempertimbangkan kedudukan negara berkembang dan miskin di dalam pelaksanaan perjanjian TRIMs.

Dimasukkannya prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian TRIMs merupakan suatu perkembangan baru di dalam hukum perdagangan internasional. Hal ini merupakan perkembangan penting, karena sepanjang menyangkut penanaman modal, masyarakat internasional selama ini menggunakan cara penyelesaian sengketa secara tradisional, antara lain arbitrase nasional dan internasional.

Pada prinsipnya perjanjian TRIMs melarang *performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang tidak sesuai dengan Pasal III GATT tentang Perlakuan Nasional dan Pasal XI GATT tentang Larangan Pembatasan Kuantitatif dalam peraturan penanaman modal. Perjanjian TRIMs tidak mengatur secara

⁶³ *Ibid.* h.126.

tegas bentuk *performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang tidak sesuai dengan Pasal III dan Pasal XI GATT.

Perjanjian TRIMs tidak melarang semua bentuk persyaratan pelaksanaan yang dipersyaratkan dalam penanam modal, tetapi hanya bentuk-bentuk persyaratan tertentu saja yang dapat menghambat perdagangan barang internasional. Persyaratan pelaksanaan lain, seperti persyaratan tenaga kerja, bidang usaha, komposisi kepemilikan saham asing, alih teknologi, insentif investasi dan nasionalisasi belum tersentuh oleh perjanjian TRIMs.⁶⁴

⁶⁴ Mahmud Siregar, *op. cit.*, h. 24.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN TRIMs DALAM

UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

(Studi Terhadap Penanaman Modal Asing)

A. Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut TRIMs

1. Penanaman Modal yang Terkait Dengan Perdagangan

Dewasa ini, negara-negara penerima pananaman modal asing tidak lagi menganggap masuknya modal asing sebagai suatu ancaman. Mereka tidak lagi memandangnya dengan kecurigaan. Sikap ini berbeda dengan awal tahun 1960-an. Pada waktu itu negara-negara sedang berkembang masih menganggap bahwa masuknya modal asing adalah suatu ancaman penjajahan, khususnya dalam bidang ekonomi. Karena itu, setiap bentuk modal asing akan dipandang sebagai sesuatu yang patut dicurigai. Dewasa ini pandangan tersebut berubah, modal asing tidak lagi dipandang sebagai ancaman, sekarang negara berkembang berpendapat, bahwa modal asing dapat memberi modal kerja dan mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar.⁶⁵

Penanaman modal asing dapat pula berperan dalam meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional. Meskipun adanya aspek-aspek positif dari PMA dalam membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara

⁶⁵ Huala Adolf, *op.cit.*, h. 6.

penerima, PMA dapat pula berdampak negatif terhadap perekonomian negara penerima. Sudah lama diakui juga bahwa PMA dapat melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli setempat, khususnya dinegara-negara berkembang. Dengan mengingat dampak-dampak negatif PMA, dewasa ini negara-negara berkembang umumnya berpendapat bahwa aktifitas atau ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar ini perlu dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas menanamkan modalnya disegala sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah timbulnya aspek-aspek negatif tersebut.⁶⁶

Negara-negara berkembang pada umumnya menetapkan pengawasan modal yang tertuang dalam berbagai upaya penanaman modal dan persyaratan-persyaratan penanaman modal. Persyaratan-persyaratan tersebut tertuang dalam TRIMs terhadap perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya. TRIMs ini menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menetapkan aturan-aturan investasi yang berkaitan dengan perdagangan yang bertentangan dengan perlakuan nasional dan pembatasan kuantitatif.⁶⁷ Tujuan utama dari penguasaan upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan penanaman modal ini oleh negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran PMA sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya. Tujuan lainnya dari negara tuan rumah didalam menetapkan TRIMs ini adalah mencegah perusahaan PMA

⁶⁶ *Ibid*, h. 8.

⁶⁷ Salim HS, Budi Sutrisno, *op.cit.*, h. 24.

untuk membuat putusan atau kebijakan yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Disamping itu pula, penerapan TRIMs dipandang semata-mata sebagai suatu hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA didalamnya guna mencegah dampak buruk dari PMA. Namun para investor asing sebaliknya berpendapat lain. Mereka beranggapan TRIMs merupakan rintangan terhadap perdagangan dunia dan aliran penanaman modal serta telah menghalangi mereka dalam menerapkan strategi kompetitif global yang terpadu.⁶⁸

Pada umumnya persyaratan penanaman modal dapat digolongkan kedalam dua bentuk. Pertama, persyaratan masuk. Biasanya badan penanaman modal dari negara penerima memeriksa apakah usulan penanaman modal asing sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan negaranya. Pertimbangan lainnya, apakah proposal tersebut memberikan keuntungan kepada negara penerima. Apabila negara penerima setelah memeriksa suatu proposal PMA beranggapan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi persyaratan masuk atau persyaratan kebijakan penanaman modal nasionalnya, maka pemerintah tersebut dapat menolak permohonan penanaman modal. Sebaliknya, manakala pemerintah negara penerima beranggapan bahwa suatu usulan PMA memenuhi persyaratan untuk masuknya suatu penanaman modal, maka negara yang bersangkutan akan menerapkan persyaratan yang kedua yaitu persyaratan operasional atau persyaratan pelaksanaan. Namun demikian,

⁶⁸ Huala Adolf, *op.cit*, h.12

peraturan pelaksana yang paling umum adalah persyaratan menggunakan kandungan lokal, persyaratan perdagangan yang berimbang, persyaratan ekspor, pembatasan impor, persyaratan mata uang asing dan pengiriman mata uang asing, persyaratan modal minimum, persyaratan alih teknologi dan persyaratan lisensi produk.⁶⁹

Dengan diterapkannya persyaratan-persyaratan penanaman modal tersebut negara tuan rumah akan memasukkan bahwa PMA akan memberikan keuntungan maksimum kepada pembangunan ekonominya. Dalam hal ini PMA akan digunakan sebaik-baiknya untuk membangun atau untuk memenuhi rencana pembangunan atau rencana perekonomian negaranya. Semua persyaratan ini biasa untuk dipraktekkan oleh negara tuan rumah. Legalitas upaya ini disandarkan pada alasan untuk memelihara kedaulatan dan pengawasan negara terhadap PMA. Setiap usulan penanaman modal yang tidak memenuhi tujuan dari negara tuan rumah atau usulan PMA yang diduga akan membahayakan tujuan pembangunan negaranya, maka negara tersebut akan menolak masuknya PMA.

Pada prinsipnya hukum internasional memberikan kekuasaan atau hak-hak berdaulat kepada suatu negara untuk mengatur setiap kegiatannya. Termasuk didalamnya adalah kegiatan perdagangan atau penanaman modal diwilayahnya. Semua upaya atau kebijakan penanama modal tersebut adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional seperti WTO dan TRIMs. Perlu ditekankan disini adalah bahwa jangka waktu penanaman

⁶⁹ *Ibid*, h.13

modal perusahaan multinasional dinegara tuan rumah biasanya cukup lama antara 25-30 tahun dan bisa diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷⁰ Karena itu pertimbangan waktu inilah yang menjadi latar belakang mengapa negara tuan rumah mengatur ruang lingkup PMA. Langkah ini perlu guna mengantisipasi akibat-akibat yang mungkin timbul dikemudian hari dari PMA melalui berbagai kebijakan atau persyaratan. Kewenangan negara tuan rumah untuk mengatur masuk PMA hanya tunduk kepada perjanjian-perjanjian internasional dibidang PMA yang ditandatangani oleh negara yang bersangkutan. Pengakuan atas hak ini sangat penting untuk negara-negara khususnya negara berkembang. Hak tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengawasi masuknya PMA.⁷¹

Menurut M. Sornajarah, hukum internasional berperan penting didalam penanaman modal. Peranan hukum ini juga sangat luas, yaitu berperan penting didalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara dua negara yakni negara penerima dengan negara dari investor. Uraian diatas menunjukkan bahwa hukum internasional telah mengakui hak negara-negara untuk mengontrol investor asing. Ironisnya perkembangan hukum internasional dibidang ini, khususnya PMA masih diwarnai oleh berbagai debat diantara para ahli hukum internasional. Pada prinsipnya sarjana dari negara maju berpandangan perlunya suatu rezim hukum internasional yang liberal, yaitu rezim yang tidak boleh menghalangi aliran penanaman modal kemana pun juga.⁷² Sedangkan

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷² Website Solusi Hukum; <http://www.solusihukum.org>. (Terakhir kali dikunjungi 12 Februari 2011).

sarjana dari negara berkembang acapkali masih bersandar pada prinsip kedaulatan negara. Mereka berpendapat bahwa hak berdaulat setiap negara untuk mengontrol setiap PMA, dari manapun asalnya yang masuk kedalamnya. Pandangan negara-negara maju terhadap adanya TRIMs adalah bahwa TRIMs tersebut telah memaksa mereka untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomis didalam rencana penanaman modal mereka. Dalam pandangan mereka, TRIMs tidaklah kondusif dan telah menjadi rintangan bagi perdagangan. Karena itu mereka bertekad untuk mengurangi atau bahkan menghapus adanya upaya-upaya TRIMs tersebut.⁷³

Negosiasi mengenai TRIMs merupakan salah satu agenda penting selama Putaran Uruguay. Selama negosiasi mengenai TRIMs berlangsung sering terjadinya konflik antara negara maju dan negara sedang berkembang. Konflik utama yang terjadi adalah adanya perbedaan pandangan mengenai sifat TRIMs. Beberapa negara maju beranggapan TRIMs bertentangan dengan berbagai aturan dalam pasal GATT. Sedangkan negara sedang berkembang pada umumnya berpendapat TRIMs bukan atau tidak dibuat untuk merintangi perdagangan.⁷⁴

Dalam perspektif Indonesia, kegiatan dalam Perundingan Putaran Uruguay merupakan pengalaman baru dalam menangani masalah perdagangan internasional. Kepentingan dasar Indonesia untuk turut secara aktif dalam Perundingan Putaran Uruguay tidak terlepas dari kepentingan nasional

⁷³ Huala Adolf, *op.cit*, h.16.

⁷⁴ Website Solusi Hukum; <http://www.solusihukum.org>. (Terakhir kali dikunjungi 12 Februari 2011).

Indonesia, karena pembangunan nasional secara menyeluruh merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia. Dibiidang ekonomi tujuan pembangunan hanya dapat tercapai bila Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yang dalam hal ini sektor luar negeri telah memegang peranan penting. Pada tahun 1970 sektor migas menjadi andalan dari program pembangunan, namun sejak tahun 1980, Indonesia memusatkan perhatian terutama pada sektor nonmigas. Diluar negeri upaya pengamanan ekspor nonmigas tergantung pada keterbukaan pasar internasional agar kepentingan ekspor nonmigas Indonesia tetap terjamin. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Indonesia bersama negara anggota lainnya berupaya untuk menjaga agar keterbukaan sistem perdagangan internasional yang hingga sekarang masih dipertahankan melalui GATT dapat terjamin. Atas pertimbangan tersebut, Indonesia turut serta secara aktif dalam Perundingan Putaran Uruguay.⁷⁵

Menyadari pentingnya PMA, pemerintah Indonesia menciptakan iklim penanaman modal yang dapat menarik masuknya modal asing di Indonesia, yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. Kebijakan untuk mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan subsidi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang penanaman modal dan perdagangan diberi prioritas

⁷⁵ H.S. Kartdjoemena , *op.cit.*, h.15

dan fasilitas. Alasan kebijakan lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.⁷⁶

2. Perjanjian WTO Mengenai TRIMs

Atas desakan negara maju timbul tekanan agar merundingkan perjanjian yang membatasi hak suatu pemerintah untuk menerapkan aturan dalam investasi yang dianggap menimbulkan penyimpangan dalam perdagangan internasional.⁷⁷

Perundingan mengenai TRIMs, sebagaimana digambarkan diatas, tidak berjalan mulus. Kepentingan dan perhatian dari para perunding (negosiator) pada saat berakhirnya perundingan sangat sedikit. Namun demikian, inisiatif Direktur Jenderal GATT, Athur Dunkel sangat berarti. Beliau membuat rancangan perjanjian yang merupakan hasil dari perundingan mengenai TRIMs.

Teks perjanjian TRIMs memuat upaya-upaya penanaman modal yang dilarang, jangka waktu transisi untuk negara-negara anggota untuk menghapus praktik-praktik yang dilarang. Perjanjian tersebut juga mengakomodasi kepentingan negara sedang berkembang. Perjanjian membolehkan negara berkembang untuk tidak menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian perjanjian untuk sementara waktu. Perjanjian juga membuat suatu ketentuan untuk meninjau kembali muatan perjanjian TRIMs.⁷⁸

⁷⁶ Website Education Feed Fury; <http://www.educationfeedfurry.com>. (Terakhir kali dikunjungi 22 Februari 2011).

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, h. 106

Ketentuan mengenai TRIMs sebagaimana termuat dalam rancangan perjanjian kemudian berhasil disahkan menjadi perjanjian TRIMs tanpa mengalami perubahan yang berarti. Patut diperhatikan pula bahwa Amerika Serikat yang semula menentang keras dimasukkannya ketentuan substantif TRIMs secara luas pada akhirnya mengakui hasil-hasil perundingan mengenai TRIMs. Perubahan sikap ini antara lain adalah karena Perundingan Putaran Uruguay telah sepakat untuk memasukkan agenda HAKI dan perdagangan dibidang jasa kedalam Perundingan Uruguay.⁷⁹

Perjanjian TRIMs seperti dikemukakan diatas, tidaklah komprehensif. Perjanjian ini termuat dalam lampiran 1 dari teks Perjanjian Putaran Uruguay. Namun demikian perjanjian ini merupakan perjanjian yang tersingkat dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Perjanjian hanya memuat 9 (Sembilan) pasal ditambah daftar ilustrasi TRIMs.⁸⁰

Preambul perjanjian TRIMs memuat dan menegaskan putusan mandat *Deklarasi Punta Del Este* bahwa beberapa upaya penanaman modal tertentu dapat menyebabkan rintangan terhadap perdagangan dan berakibat yang merugikan.⁸¹

Pasal 1 (satu) perjanjian TRIMs menyatakan :

*“This agreement applies to investment measures related to trade in goods only (referred to in this agreement as “TRIMs”).”*⁸²

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, h. 107

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Perjanjian TRIMs pasal 1. (Terjemahanya: Perjanjian ini hanya terkait dengan perdagangan dibidang barang (yang terkait dengan penanaman modal).

Maksud dari pasal ini adalah bahwa perjanjian hanya terkait dengan perdagangan dibidang barang (yang terkait dengan penanaman modal). Pasal ini dengan jelas menyatakan keinginan negara sedang berkembang yang menginginkan agar pengaturan dibidang ini tidak memuat aturan baru atau tambahan.⁸³

Pasal 2 (dua) perjanjian TRIMs tentang Perlakuan Nasional dan Pembatasan Kuantitatif, menyatakan:

1. *“Without prejudice to other right and obligation under GATT 1994, no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI GATT 1994.*
2. *An Illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement.”*⁸⁴

Pasal ini merupakan penegasan kembali pasal III dan pasal XI GATT 1994 tentang Perlakuan Nasional dan Pembatasan Kuantitatif. Pasal ini dengan tegas melarang negara anggota untuk menerapkan TRIMs yang tidak sesuai dengan pasal III dan pasal XI GATT tersebut.⁸⁵

⁸³Huala Adolf, *op.cit.*, h.107.

⁸⁴Perjanjian TRIM pasal 2. (Terjemahannya: 1."Tanpa mengurangi hak lain dan kewajiban dari GATT 1994, tidak ada negara anggota yang menerapkan TRIMs yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal III atau Pasal XI GATT 1994. 2. Sebuah daftar Ilustrasi dari TRIMs yang tidak sejalan dengan kewajiban perjanjian nasional yang diatur dalam ayat 4 Pasal III GATT 1994 dan kewajiban penghapusan pembatasan kuantitatif umum diatur dalam ayat 1 Pasal XI GATT 1994 terdapat dalam Lampiran Persetujuan ini).

⁸⁵ Huala Adolf, *op.cit.*, h. 108

⁸⁵ *Ibid.* h.118.

Pasal III GATT 1994 berisi larangan pengenaan pajak dan upaya-upaya lainnya yang diskriminatif terhadap produk-produk impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Pengertian upaya-upaya lainnya disini adalah segala upaya, baik pungutan di dalam negeri atau penerbit undang-undang, peraturan atau persyaratan-persyaratan administratif yang mempengaruhi penjualan, penawaran, pembelian, pengangkutan, distributif atau penggunaan produk. Berdasarkan prinsip perlakuan nasional ini, semua produk impor yang sudah memenuhi aturan-aturan kepabeanan harus mendapat perlakuan yang sama seperti halnya produk-produk dalam negeri di negara tersebut.⁸⁶

Disebutkan dalam pasal III ayat (1) GATT 1994, negara anggota WTO dilarang untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan serta merupakan suatu upaya untuk memproteksi perdagangan nasional dari negara anggota, seperti peraturan pajak atau pembayaran lainnya serta peraturan-peraturan tentang pembatasan kuantitas atas suatu produk. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara diskriminatif antara pengusaha nasional dan asing, sedangkan pasal XI GATT menegaskan larangan pembatasan kuantitatif. Pembatasan kuantitatif yang sering dipraktekkan adalah kuota atau jumlah dari produk yang dihasilkan, lisensi atau surat izin impor atau ekspor atau upaya lainnya disamping bea masuk, pajak atau pungutan lainnya.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, h. 122.

Berdasarkan Perjanjian TRIMs, terdapat dua ukuran yang menyatakan suatu persyaratan penanaman modal melanggar prinsip *National Treatment* yaitu persyaratan penggunaan komponen buatan dalam negeri dan persyaratan keseimbangan perdagangan.⁸⁸ Praktek pembatasan kuantitatif dilarang dalam perjanjian TRIMs apabila pembatasan kuantitatif tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal.⁸⁹

Pasal 3 (tiga) Perjanjian TRIMs menyatakan :

*“All exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provision of this Agreement”*⁹⁰

Menurut pasal ini, semua pengecualian yang termuat dalam GATT 1994 akan tetap berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal perjanjian TRIMs, seperti misalnya moral masyarakat, perlindungan lingkungan, keamanan nasional dan lain-lain.⁹¹

Pasal 4 (empat) Perjanjian TRIMs menyatakan :

“A developing country Member shall be free to deviate temporarily from the provisions of Article 2 to the extent and such a manner as Article XVII of GATT 1994, the understanding on the Balance-of-Payments Provisions of GATT 1994, and the Declaration on Trade Measures taken for Balance-of-Payment Purpose adapted on 28 November 1979 (BISD 26S/205-209)

⁸⁸ Website Penanaman Modal; <http://www.penanamanmodal.com>. (Terakhir dikunjungi 22 Februari 2011).

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Perjanjian TRIMs, pasal 3. (Terjemahannya: Semua pengecualian di bawah GATT 1994 berlaku, sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini).

⁹¹ Huala adolf, *op.cit*, h.108.

*permit the Member to deviate from the provisions of Article III and XI of GATT 1994”.*⁹²

Pasal 4 (empat) secara khusus ditujukan kepada negara sedang berkembang. Pasal ini membolehkan negara-negara ini untuk menyimpang sementara waktu dari ketentuan Pasal 2 perjanjian TRIMs, sepanjang dan sesuai dengan ketentuan Pasal III dan XI GATT dapat disimpangi sesuai dengan Pasal XVII GATT 1994, pemahaman neraca pembayaran ditentukan oleh GATT dan deklarasi mengenai upaya-upaya perdagangan yang diambil dengan tujuan penyeimbangan neraca perdagangan.

Pasal 5 (lima) Perjanjian TRIMs menyatakan:

Ayat (1) : *“Members, within 90 days of the date of entry into force of the WTO Agreement, shall notify the Council for Trade in Goods of all TRIMs they are applying that are not in conformity with the provisions of this Agreement. Such TRIMs of general or specific application shall be notified, along with their principal features”.*⁹³

⁹² Perjanjian TRIMs, pasal 4. (Terjemahannya: Sebuah negara berkembang bebas untuk menyimpang sementara waktu dari ketentuan Pasal 2 TRIMs sejauh dan sesuai Pasal XVII GATT 1994, tentang Perimbangan Ketentuan Pembayaran GATT 1994, dan Deklarasi tentang perdagangan tindakan yang dilakukan untuk tujuan neraca pembayaran yang diadaptasi pada tanggal 28 November 1979 (BISD 26S/205-209) mengizinkan negara anggota menyimpang sementara waktu dari ketentuan Pasal III dan XI GATT 1994).

⁹³ Perjanjian TRIMs, pasal 5 ayat (1). (Terjemahannya: Negara anggota, dalam waktu 90 hari dari tanggal berlakunya Persetujuan GATT, harus memberitahukan Dewan Perdagangan Barang dari perjanjian TRIMs yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. TRIMs seperti aplikasi umum maupun khusus harus diberitahukan, bersama dengan fitur utama mereka).

Pasal 5 ayat (1) mensyaratkan negara anggota untuk menotifikasi kepada Dewan Perdagangan Barang dalam jangka waktu 90 hari setelah berlakunya perjanjian TRIMs yang tidak sesuai yang ditetapkan negara-negara anggota.

Ayat (2) : *“Each Member shall eliminate all TRIMs which are notified under paragraph 1 within two years of the date of entry into force of the WTO Agreement in the case of the a developing country Member, and within seven years in the case of a least-developed country Member”*⁹⁴.

Pasal 5 ayat (2) TRIMs mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menghapuskan semua TRIMs yang dinotifikasi sebagaimana yang terdapat pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara sedang berkembang, dan 7 (tujuh) tahun untuk negara miskin atau negara paling terbelakang. Selama dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, negara anggota yang menerapkan aturan TRIMs yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam TRIMs harus menghapus adanya TRIMs yang diterapkan di negaranya.

Ayat (3) : *“On request, the Council for Trade in Goods may extend the transition period for the elimination of TRIMs notified under paragraph 1 for a developing country Member, including a least-developed country Member, which demonstrates*

⁹⁴ Perjanjian TRIMs, pasal 5 ayat (2). (Terjemahannya: Setiap negara anggota harus menghapuskan semua TRIMs yang diberitahukan berdasarkan ayat 1 dalam waktu dua tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO dalam kasus negara berkembang, dan dalam tujuh tahun dalam kasus bukan negara berkembang).

*particular difficulties in implementing the provisions of this Agreement. In considering such a request, the Council for Trade in Goods shall take into account the individual development, financial and trade needs of the Member in question”.*⁹⁵

Pasal 5 ayat (3) membolehkan negara sedang berkembang untuk memperpanjang jangka waktu transisi apabila mereka menghadapi masalah atau kesulitan-kesulitan dalam mengimplementasikan perjanjian TRIMs.⁹⁶ Namun demikian, untuk dapat memperoleh perpanjangan waktu transisi ini tidaklah mudah. Pasal 5 ayat (3) menentukan dua persyaratan sebagai berikut:

- a. Perjanjian mensyaratkan negara sedang berkembang bersangkutan untuk menunjukkan bahwa negara tersebut menghadapi kesulitan di dalam melaksanakan perjanjian TRIMs.
- b. Permohonan waktu transisi tersebut tidak diberikan secara otomatis. Permohonan tersebut tunduk pada persetujuan dari Dewan Perdagangan Barang setelah badan ini mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari negara yang bersangkutan.

Ayat (4) : *“During the transition period, a Member shall not modify the term of any TRIMs which it notifies under paragraph 1 from*

⁹⁵ Perjanjian TRIMs, pasal 5 ayat (3). (Terjemahannya: Berdasarkan permintaan, Dewan Perdagangan Barang dapat memperpanjang masa transisi untuk menghapuskan TRIMs yang diberitahukan berdasarkan ayat 1 untuk negara berkembang, yang menunjukkan kesulitan tertentu dalam melaksanakan ketentuan Persetujuan ini. Dalam mempertimbangkan permintaan tersebut, Dewan Perdagangan Barang harus mengacu kepada catatan perkembangan individu, kebutuhan finansial dan perdagangan negara anggota yang bersangkutan).

⁹⁶ Huala adolf, *op.cit.*, h. 109.

those prevailing at the date of entry force of the WTO Agreement so as to increase the degree of inconsistency with the provisions of article 2.”.⁹⁷

Selama masa transisi, negara anggota tidak diperbolehkan mengubah atau mengurangi aturan TRIMs yang telah diberitahukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ayat (1), yang berlaku setelah Perjanjian WTO disetujui.

Ayat (5) :*“Notwithstanding the provisions of Article 2, a Member, in order not to disadvantage established enterprises wich are subject to a TRIMs notified under paragraph 1, may apply during the transition period the same TRIM to a new investment (I) where the product of such as investment are like product to those of the established enterprises, and (ii) where necessary to avoid distorting the conditions of competition between the new investment and the established enterprises. Any TRIMs so applied to a new investment shall be notified to the Council for Trade in Goods. The terms of such as a TRIM shall be equivalent in their competitive effect to those applicable to the established enterprises, and it shall be terminated at the same time”.*⁹⁸

⁹⁷ Perjanjian TRIMs, pasal 5 ayat (4). (Terjemahanya: Selama masa transisi, negara anggota tidak akan memodifikasi jangka waktu setiap aturan TRIMs yang telah diberitahukan berdasarkan ayat 1, yang berlaku setelah Persetujuan WTO disetujui sehingga meningkatkan derajat ketidaksesuaian dengan ketentuan pasal 2).

⁹⁸Perjanjian TRIMs, pasal 5 ayat (5). (Terjemahannya: Negara anggota yang menyimpang dari ketentuan Pasal 2, agar tidak merugikan perusahaan baru yang dikenakan aturan TRIMs diberitahukan berdasarkan ayat 1, berlaku selama periode transisi aturan TRIMs untuk investasi baru (I) dimana produk investasi dari perusahaan mapan, dan (ii) bila perlu untuk menghindari mendistorsi kondisi persaingan antara investasi baru dan perusahaan yang didirikan,

Pasal 5 ayat (5) memuat suatu ketentuan khusus yang membolehkan penerapan TRIMs terhadap perusahaan-perusahaan baru selama jangka waktu transisi apabila hal ini dipandang perlu agar tidak merugikan perusahaan yang telah ada yang tunduk kepada ketentuan Perjanjian TRIMs (Ayat 5).⁹⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian TRIMs, maka yang menjadi kewajiban Indonesia sebagai (negara berkembang) adalah:

1. Dalam waktu 90 hari sejak berlakunya Perjanjian TRIMs, harus menotifikasi kepada Dewan Perdagangan Barang seluruh TRIMs yang diterapkan dan tidak sejalan dengan perjanjian TRIMs disertai dengan penjelasannya.
2. Menghapuskan semua TRIMs yang dinotifikasi tersebut dalam waktu 5 tahun sejak berlakunya perjanjian TRIMs.
3. Selama masa transisi tidak diperkenankan mengubah atau menambah aturan-aturan investasi yang dapat menambah masalah baru terhadap jalannya perdagangan bebas.

Pasal 6 Perjanjian TRIMs menyatakan :

Ayat (1) : *“Members reaffirm, with respect to TRIMs, their commitment to obligation on transparency and notification in Article X of GATT 1994, in the undertaking on “Notification” contained in the Understanding Regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance (adopted on 28 November*

setiap TRIMs yang diterapkan pada investasi baru harus diberitahukan kepada Dewan Perdagangan Barang. Persyaratan seperti TRIM harus setara dalam efek kompetitif mereka untuk mereka yang berlaku untuk perusahaan didirikan, dan akan berakhir pada waktu yang sama)

⁹⁹ *Ibid.*

1979) and in the Ministerial Decision on Notification Procedures (adopted on 15 April 1994)".¹⁰⁰

Pasal 6 memuat kewajiban transparansi di dalam menerapkan Perjanjian TRIMs, misalnya dalam hal penyelesaian sengketa penanaman modal.

Ayat (2) :*"Each member shall notify the secretariat of the publication in which TRIMs may be found, including those applied by regional and local government and authorities their territories."*¹⁰¹

Pasal ini mensyaratkan kewajiban notifikasi kepada sekretariat WTO mengenai publikasi adanya TRIMs, termasuk TRIMs yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan atau pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kebijakan penanaman modal di dalam wilayah kekuasaannya.

Ayat (3) :*"Each member shall accord sympathetic consideration to request information, and afford adequate opportunity for consultation, on any matter arising from this Agreement raised by another member. In conformity with Article X of GATT 1994 no Member is required to disclose information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public*

¹⁰⁰Perjanjian TRIMs, pasal 6 ayat (1). (Terjemahannya: Negara anggota harus menegaskan kembali, sehubungan dengan TRIMs, komitmen mereka terhadap kewajiban pada transparansi dan pemberitahuan dalam Pasal X GATT 1994, dalam melaksanakan "Pemberitahuan" yang terkandung dalam Pemberitahuan, Konsultasi, Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan (diadopsi tanggal 28 November 1979) dan dalam Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pemberitahuan (diadopsi pada tanggal 15 April 1994)).

¹⁰¹Perjanjian TRIMs, pasal 6 ayat (2). (Terjemahannya: Setiap anggota harus memberitahu sekretariat publikasi di mana TRIMs dapat ditemukan, termasuk yang diterapkan oleh pemerintah regional dan lokal dan otoritas wilayah mereka).

*interest or would prejudice the legitimate commercial interest of particular enterprises, public or private”.*¹⁰²

Pasal ini berkaitan dengan Pasal X GATT yang mengatur persyaratan publikasi dan administrasi pengaturan-pengaturan perdagangan, yang menegaskan bahwa undang-undang, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan dan administratif mengenai klasifikasi atau penilaian produk-produk untuk tujuan kepabeanan, pajak, pungutan atau segala persyaratan yang mempengaruhi penjualan, distribusi, transportasi, dan lain-lain harus dipublikasikan secara wajar sehingga para anggota dan para pedagang mengetahuinya.¹⁰³

Pasal 7 (tujuh) Perjanjian TRIMs menyatakan :

Ayat (1) : *“A Commite on Trade Related Investment Measures (referred to in this Agreement as the “Committee”) is hereby established, and shall be open to all member. The Committee shall elect its own Chairman and Vice Chairman, and shall meet not less than once a year and otherwise at the request of any Member”.*¹⁰⁴

¹⁰²Perjanjian TRIMs, pasal 6 ayat (3). (Terjemahanya: Setiap negara anggota harus mempertimbangkan untuk meminta informasi , dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk konsultasi, mengenai setiap masalah yang timbul dari Perjanjian ini yang diajukan oleh anggota lain. Sesuai dengan Pasal X GATT 1994 negara anggota tidak disyaratkan untuk menyajikan informasi yang pengungkapannya akan menghambat pelaksanaan hukum atau negara dengan kepentingan umum atau akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari perusahaan tertentu, publik atau swasta).

¹⁰³ Huala Adolf, *op.cit.*, h. 122.

¹⁰⁴ Perjanjian TRIMs, pasal 7 ayat (1). (Terjemahannya: Sebuah Komite Perdagangan Investasi Tindakan Terkait (disebut dalam persetujuan ini sebagai " Komite ") didirikan, dan harus terbuka untuk semua anggota. Komite harus memilih Ketua dan Wakil Ketua sendiri, dan harus bertemu tidak kurang dari sekali dalam setahun dan sebaliknya atas permintaan anggota).

Pasal 7 Ayat (1) Perjanjian TRIMs ini menyatakan bahwa komite perdagangan membentuk sebuah komisi yang mana komisi ini memilih sendiri ketua dan wakil ketuanya yang akan bertemu satu kali dalam satu tahun atau sesuai dengan keinginan anggota.

Ayat (2) : *“The Committee shall carry out responsibilities assigned to it by Council for Trade in Goods and shall afford members the opportunity to consult on any matters relating to the operation and implementation of this Agreement”*.¹⁰⁵

Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian TRIMs mewajibkan Komisi TRIMs bertanggungjawab terhadap tugasnya dan melakukan perundingan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian TRIMs.

Komisi TRIMs tersebut bertugas mengawasi pelaksanaan komitmen-komitmen dengan anggota berdasarkan perjanjian TRIMs ini dan kemudian melaporkannya setiap 5 tahun kepada Dewan Perdagangan Barang.

Pasal 8 (delapan) perjanjian TRIMs menyatakan :

“The provisions of Article XXII and XXVIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding, shall apply to consultation and the settlement of dispute under this Agreement”.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Perjanjian TRIMs, pasal 7 ayat (2). (Terjemahannya: Komite akan melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan oleh Dewan Perdagangan Barang dan mengupayakan anggota kesempatan untuk berkonsultasi tentang segala hal yang berkaitan dengan operasional dan pelaksanaan Persetujuan ini).

¹⁰⁶ Perjanjian TRIMs, pasal 8. (Terjemahannya: Ketentuan-ketentuan pasal XXII dan XXVIII GATT 1994, seperti diuraikan dan termuat dalam pengertian Penyelesaian Sengketa, akan berlaku untuk konsultasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian ini).

Pasal 8 TRIMs terkait dengan penyelesaian sengketa TRIMs. Pasal ini memberlakukan Pasal XXII-XXIII GATT 1994 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam GATT.

Pasal 9 (Sembilan) Perjanjian TRIMs menyatakan :

*“Not later than five years after the date of entry into force of the WTO Agreement, the Council for Trade in Goods shall review the operation of this Agreement and as appropriate, propose to the Ministerial Conference amendments to its text. In the course of this review, the Council for Trade in Goods shall consider whether the Agreement should be complemented with provisions on investment policy and competition policy”.*¹⁰⁷

Pasal ini menyebutkan bahwa Dewan Perdagangan Barang akan meninjau perjanjian TRIMs dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya perjanjian. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengusulkan amandemen terhadap muatan atau isi daftar ilustrasi dan mempertimbangkan ketentuan mengenai kebijakan investasi dan kebijakan persaingan.

Lampiran perjanjian memuat daftar ilustrasi TRIMs yang tidak sesuai dengan pasal III dan pasal XI GATT 1994. Lampiran ini sifatnya memaksa dan mengikat baik berdasarkan hukum substantif GATT atau aturan-aturan administratif.

¹⁰⁷Perjanjian TRIMs, pasal 9. (Terjemahannya: "Tidak lebih dari lima tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan WTO, Dewan Perdagangan Barang wajib meninjau pelaksanaan Persetujuan ini dan sebagaimana mestinya, mengusulkan perubahannya kepada Pertemuan Tingkat Menteri untuk dipelajari. Selama dalam tinjauan ini, Dewan Perdagangan Barang akan mempertimbangkan apakah perjanjian harus dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan investasi dan kebijakan persaingan).

Berikut adalah daftar ilustrasi yang dilarang berdasarkan perjanjian TRIMs.

1. Berdasarkan perlakuan nasional yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu keuntungan dalam hal penerapan :
 - a) Persyaratan untuk membeli atau kewajiban untuk menggunakan produk-produk lokal oleh perusahaan (*local content requirement*).
 - b) Pembelian atau penggunaan suatu produk impor yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai dari produk lokal yang diekspor (*trade balancing requirement*).
2. TRIMs yang tidak sesuai kewajiban pasal XI ayat 1 GATT yakni :
 - a) Impor produk hingga jumlah tertentu yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai produk yang diekspor;
 - b) Impor produk dengan membatasi akses perusahaan kepada nilai mata uang asing hingga jumlah masuknya jumlah mata uang ke perusahaan tersebut; atau
 - c) Ekspor suatu produk yang dikaitkan dengan nilai produk lokal (*domestic sales requirement*).

Dari daftar di atas dampak bahwa TRIMs lainnya tidak termasuk dalam daftar. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya lainnya masih dimungkinkan berdasarkan Perjanjian TRIMs. Ketentuan ini tampaknya berupaya mengakomodasikan kepentingan negara sedang berkembang yang seringkali masih menerapkan atau membebaskan persyaratan ini terhadap investor asing.

Di samping itu, ketentuan ini di banyak negara sedang berkembang biasanya bersifat mengikat.

Dalam laporannya tahun 1988 kelompok kerja WTO mengenai hubungan perdagangan dan penanaman modal menyatakan bahwa beberapa bentuk dari persyaratan pelaksanaan (*performance requirements*), seperti halnya persyaratan alih teknologi dan promosi untuk penelitian dan pembangunan telah terbukti sebagai suatu cara penting untuk memenuhi tujuan pembangunan.¹⁰⁸

Namun ada beberapa pembatasan dari perjanjian TRIMs ini. Pertama, perjanjian tidak memberi batasan guna mengidentifikasi suatu upaya yang tergolong kedalam TRIMs. Karena itu untuk negara anggota penotifikasi sajalah yang akan menentukan sendiri bentuk-bentuk upaya TRIMs mana sajakah yang ia anggap tidak sah berdasarkan Perjanjian TRIMs. Kedua, perjanjian TRIMs dapat dianggap sebagai suatu kemunduran dalam hal penegakan hukum. Ketiga, kekurangan lainnya dari hasil Putaran Uruguay mengenai TRIMs ini adalah bahwa perjanjian ini telah gagal untuk memasukkan ketentuan-ketentuan penting mengenai praktik bisnis yang restriktif. Ketentuan-ketentuan ini cukup penting untuk negara sedang berkembang manakala mereka berhubungan dengan investor asing yang memiliki posisi dominan dan daya asing yang kuat. Keempat, meskipun perjanjian TRIMs mengakomodasi kepentingan negara sedang berkembang

¹⁰⁸ Huala Adolf, *op.cit.*, h.111

namun perjanjian ini telah gagal untuk memberikan perlakuan khusus dan nonresiprositas negara berkembang.

B. Penerapan Aturan TRIMs Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Investasi asing merupakan faktor penting dalam meningkatkan ekonomi suatu negara. Manfaat adanya investasi adalah menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, maupun meningkatkan kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi.¹⁰⁹

Investasi dari luar yang berupa teknologi dan dana, biasanya digunakan untuk meningkatkan keahlian sebagai langkah inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh faktor iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima.¹¹⁰ Terkait dengan upaya persaingan, negara maju dan negara berkembang melakukan upaya yang berupa menciptakan suatu insentif dalam rangka mendorong dan melindungi investasi asing. Adapun yang dimaksud insentif dalam hal ini adalah berupa regulasi investasi yang didalamnya diatur mengenai insentif pajak, peningkatan infrastruktur dan penyederhanaan birokrasi.

Arus investasi asing langsung tidak dapat dipungkiri dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang sehat. Ahli teknologi dari negara maju ke negara berkembang merupakan salah satu upaya terpenting dalam rangka pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain

¹⁰⁹ Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, *op.cit.*, h.7.

¹¹⁰ Ridwan Khairandy, "Iklim investasi dan jaminan Kepastian Hukum Dalam Era Otonomi Daerah", (2006) 1:2, Jurnal Hukumn Republica, h. 150.

menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi baru dan meningkatkan strategi manajemen serta ekspor. Sebagai tambahan investasi asing langsung dapat juga dijadikan saluran untuk meningkatkan pembangunan sosial, menyediakan sumber peningkatan infrastruktur dan pelatihan kerja dalam berbagai bidang. Oleh karena itu sangat penting bagi negara berkembang untuk dapat memanfaatkan modal asing yang tersedia untuk membangun fasilitas dan menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan sektor riset dan pembangunan.¹¹¹

Kehadiran penanaman modal asing dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal, yaitu berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dengan pebisnis dalam negeri. Perkembangan investasi asing dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif untuk perkembangan perekonomian nasional. Devisa negara mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga negara kita dapat memiliki cadangan pendanaan untuk menghadapi kondisi yang kurang baik.

Dengan berbagai keuntungan investasi langsung, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka wajar apabila semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang saling bersaing untuk menarik masuknya modal asing. Ketatnya persaingan memaksa negara berkembang untuk merestrukturisasi hukum investasi mereka melalui pembangunan kerangka hukum dalam rangka menjamin kestabilan iklim investasi. Kebijakan penanaman modal yang

¹¹¹ *Ibid.*

dilaksanakan oleh suatu negara, kadang kala mengandung proteksi perdagangan, sehingga mengganggu perdagangan Internasional. Persyaratan penanaman modal didalam suatu kebijakan penanaman modal, meliputi juga tentang penggunaan kandungan lokal atau tindakan-tindakan yang mengontrol perbandingan transaksi perdagangan. WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional, berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan perdagangan antara negara anggota sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain, dan persaingan usaha yang tidak sehat antar negara. Berdasarkan fakta yang ada terkait dengan gangguan perdagangan yang timbul akibat syarat-syarat dalam penanaman modal, maka melalui TRIMs negara anggota sepakat untuk membatasi kebijakan negara anggota dalam kegiatan penanaman modal.¹¹²

Kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal di dalam negeri disambut dengan perbedaan pandangan yang sangat tajam. Sebagian mengatakan UU ini terlalu liberal, berbeda dengan landasan filosofis dan konstitusional ekonomi Indonesia yang ditetapkan dalam UUD 1945. Denni Purbasari, salah seorang yang menentang faham liberalisasi, mengemukakan liberalisasi dalam RUU PM, tidak tepat untuk meningkatkan investasi. Hal ini karena penurunan investasi disebabkan tingginya biaya berbisnis (pungli, perizinan pusat dan perda) dan menurunnya pasar Indonesia karena menurunnya daya beli.¹¹³ Perlakuan sama antara investor asing dan domestik sebagai prinsip dasar penyusunan kebijakan penanaman modal dipandang sebagai tindakan yang gegabah dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Indonesia sebagai negara yang merdeka secara

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Deni Purbasari "Penerapan Liberalisasi Dalam RUU PM Tidak Tepat" dalam www.hukumonline.com, ed.8 September 2006.

politik memiliki hal dan berdaulat untuk mengatur sistem ekonominya dengan mengutamakan kepentingan negara dan rakyatnya dan bukan justru mendahulukan kepentingan asing.

Sedangkan dari pihak pemerintah sebagai penggagas RUU PM mempunyai alasan sendiri, mengapa dirasakan perlu ada liberalisasi dalam penanaman modal. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dengan disahkannya RUU PM menjadi UU tentang Penanaman Modal, pemerintah optimis investasi usaha di berbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi adalah instrumen yang penting dalam pembangunan nasional. Diperlukan undang-undang yang benar-benar berbeda dan menarik bagi investor.

114

Bila dicermati secara seksama lahirnya UUPM memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional di era globalisasi, arus perputaran modal pun demikian cepat dari satu tempat ketempat lain. Dengan kata lain dimana ada peluang di situlah modal berhenti. Hal itu juga tercermin, dari pertimbangan diterbitkannya UUPM dalam konsideran disebutkan: bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan

¹¹⁴ Harian Umum *Suara Pembaruan*, ed. 27 Maret 2007.

keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.¹¹⁵

Menurut Yusnan, UUPM bertujuan untuk beberapa hal di antaranya: *Pertama*, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap berbagai ketidakpastian yang terkait dengan investasi; *Kedua*, untuk memperbaiki *image* investasi dalam negeri sehingga menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk asing tetapi tempat yang layak untuk melakukan investasi. Dengan diterbitkannya UUPM ini terlihat ada respon yang positif yang ditunjukkan dari angka statistik persetujuan investasi dan realisasi investasi.

Terlepas dari perbedaan tersebut, Indonesia adalah negara anggota WTO. Sebagai anggota dari pergaulan yang beradab, Indonesia memiliki kewajiban internasional yang telah disepakatinya. Tidak terkecuali UUPM harus pula harmonis dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang diterima Indonesia dalam pergaulannya pada berbagai kerjasama internasional. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka Indonesia akan dibawa kedalam penyelesaian sengketa oleh negara-negara lain yang bersangkutan.¹¹⁶

Peraturan penanaman modal terkait erat dengan peraturan perundang-undangan internasional. Titik taut dari hubungan ini adalah kemungkinan ditetapkannya persyaratan penanaman modal yang dapat menimbulkan hambatan terhadap perdagangan barang internasional. Ketentuan perdagangan internasional

¹¹⁵ Konsideran UUPM 2007 butir c dan d.

¹¹⁶ *Ibid.*

meskipun telah mengurangi kedaulatan suatu negara untuk menentukan sendiri peraturan penanaman modalnya, akan tetapi peraturan perdagangan internasional masih memberikan ruang yang cukup besar bagi negara-negara untuk menentukan kebijakan penanaman modalnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dari negara tersebut. Dengan demikian negara-negara masih dibenarkan menerapkan syarat-syarat tertentu dalam peraturan penanaman modal, sepanjang harmonis dan tidak menyebabkan hambatan terhadap perdagangan barang dan jasa internasional.¹¹⁷

1. Perlakuan Sama Terhadap Penanaman Modal di Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip TRIMs sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Indonesia memberikan perlakuan yang sama antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UUPM yang menyatakan:

“Penanaman modal dilakukan berdasarkan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.”¹¹⁸

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari suatu negara asing lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada penanam modal asing untuk

¹¹⁷ Website Solusi hukum; <http://www.solusihukum.com>. (Terakhir kali dikunjungi 27 Februari 2011).

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 5 Ayat (1 dan 2).

menanamkan modal di Indonesia dengan perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dengan penanam modal dari negara asing lainnya. Prinsip “nondiskriminasi” dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebenarnya diambil dari arti pengertian prinsip *National Treatment* yang terdapat dalam Pasal II Perjanjian TRIMs.¹¹⁹

Aturan dalam TRIMs tersebut juga telah diterapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang menyatakan :

“Dalam menetapkan kebijakan dasar penanam modal, pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.”¹²⁰

Kaidah dalam pasal 4 ayat (2) UUPM tersebut mengandung dua variabel yang harus dimaknai secara utuh, yakni kewajiban memberikan perlakuan sama dan mengacu kepada kepentingan nasional. Hal ini berarti perlakuan sama tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan nasional. Artinya dalam keadaan-keadaan tertentu perlakuan sama tersebut dapat tidak diterapkan kepada penanam modal asing. Tentunya pengecualian semacam ini harus sesuai dengan kesepakatan Internasional.¹²¹

¹¹⁹ Website Solusi hukum; <http://www.solusihukum.com>.

¹²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *op. cit.*, Pasal 4 Ayat (2).

¹²¹ Mahmud Siregar, *op. cit.*, h. 27.

Pasal XVII GATT mengatur perusahaan dagang negara dapat menimbulkan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip umum mengenai perlakuan nondiskriminatif dalam kaitannya dengan upaya-upaya pemerintah yang mempengaruhi impor dan ekspor oleh pedagang.¹²² Dengan adanya pengakuan pasal tersebut, pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara sedang berkembang. Dalam hal ini negara tersebut dapat memberlakukan pembatasan kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing (devisa) mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya.¹²³

2. Perlakuan Khusus Terhadap Negara-Negara Tertentu

Pasal 6 Undang-undang Penanaman Modal menyatakan :

Ayat (1) : “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara maupun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²² *Ibid.* h. 114.

¹²³ *Ibid.*

(2) : “Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia”.¹²⁴

Namun, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUPM, perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis dan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan Indonesia.¹²⁵

Dalam hukum perdagangan Internasional ketentuan yang demikian didasarkan pada prinsip *Standard of Preferential Treatment* (prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang dimaksud memberikan hak sama bagi semua pihak). Prinsip ini membuka peluang adanya penyimpangan dari prinsip *Most Favoured Nation* (MNF) melalui perlakuan khusus terhadap negara-negara tertentu, seperti negara tetangga dan wilayah perdagangan regional atau kawasan tertentu. Misalnya, diantara negara-negara dalam kawasan tertentu seperti ASEAN, *Free Trade Area* yang merupakan wujud dari kesepakatan dinegara ASEAN untuk membentuk kawasan khusus perdagangan bebas yang mana tidak memberlakukan hambatan tarif bagi negara ASEAN. Negara anggota ASEAN sepakat untuk menghapus semua

¹²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *op. cit.*, Pasal 6 Ayat (1 dan 2).

¹²⁵ Mahmud Siregar., *op.cit.*, h. 28.

bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010 dan Indonesia, Malaysia, Piliphina, Singapura, Thailand, Laos, Mnyanmar dan Vietnam pada tahun 2015.¹²⁶

Berdasarkan hal tersebut prinsip-prinsip WTO secara umum telah diterapkan dalam UUPM. Prinsip umum WTO yaitu *National Treatment dan MFN*, berdasarkan Pasal 3 dan 6 UUPM telah menjadi jiwa dari rezim penanaman modal di indonesia. Berdasarkan atas hal tersebut maka selayaknya kesemuanya hak dan kewajiban penanam modal asing berlaku juga bagi penanam modal dalam negeri dan tiap negara anggota mendapatkan perlakuan sama, akan tetapi masih terdapat pasal-pasal di dalam UUPM yang memberikan perlakuan yang berbeda terhadap suatu negara.

3. Daftar Negatif Investasi

Daftar negatif Investasi (daftar bidang usaha apa saja yang tidak dapat para investor asing masuki), pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal menyatakan :

Ayat (1) : “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”.¹²⁷

Ayat (2) : “Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah
a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang;

¹²⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI. *Manfaat Dan Peluang Pembentukan Asean Investment Area (AIA) dalam Menarik Investor Asing Ke Indonesia*. (Jakarta: 2003). h.24-26.

¹²⁷ UU NO 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 12 ayat (1).

b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.”¹²⁸

Ayat (3) : “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”.¹²⁹

Ayat (4) : “Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden”.¹³⁰

Ayat (5) : “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah”.¹³¹

Jika dipahami secara menyeluruh sebenarnya UUPM tidak memberikan perlakuan yang benar-benar sama antar PMA dan PMDN. Beberapa ketentuan

¹²⁸ *Ibid.* Ayat (2.)

¹²⁹ *Ibid.* Ayat (3).

¹³⁰ *Ibid.* Ayat (4).

¹³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 12.

dari UUPM tersebut membebaskan sejumlah pembatasan penanaman modal terhadap PMA, salah satu diantaranya adalah pembatasan bidang usaha pada PMA. Dengan demikian tidak semua bidang usaha terbuka untuk penanaman modal. Ada bidang-bidang yang tertutup bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Begitu juga terdapat bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Selanjutnya ada bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dengan persyaratan tertentu. Peraturan Presiden RI No. 77 tahun 2007 mengatur tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Tertentu di bidang Penanaman Modal.

Pasal 12 UUPM sebenarnya tidak membuka seluruh bidang usaha kepada investor asing, bidang usaha yang terkait langsung dengan keamanan negara seperti produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang serta bidang usaha yang secara eksplisit dalam undang-undang dinyatakan tertutup, tidak dibenarkan bagi penanam modal asing.

Perbedaan antara penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing adalah bentuk badan usaha dan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bersyarat.¹³² *Pertama*, untuk penanaman modal dalam negeri badan usaha dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum seperti PT dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum seperti Firma, CV dan Perusahaan Perseorangan. Sedangkan untuk penanam modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas. *Kedua*, tidak semua bidang usaha terbuka

¹³² *Ibid.*

untuk semua modal asing. Berbagai bidang usaha yang ada hanya untuk penanam modal dalam negeri. Ada bidang usaha, dimana modal asing harus bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri, atau bekerja sama dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK).¹³³

Kesepakatan yang telah dituangkan kedalam perjanjian internasional merupakan komitmen negara yang terikat dengan suatu perjanjian tersebut untuk melaksanakannya dan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut akan melahirkan pertanggungjawaban internasional kepada negara-negara yang telah sepakat atau menjadi anggota dari suatu perjanjian internasional.¹³⁴ Keterikatan suatu negara bukan berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) negara tersebut menjadi hilang. Hal tersebut diatas terkait terhadap kedaulatan ekonomi internal suatu negara. Kedaulatan ekonomi internal ini adalah kekuasaan negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi untuk melaksanakan kekuasaan monopolinya di dalam wilayahnya. Keinginan untuk mengatur atau memonopoli ini sebenarnya keinginan negara sedang berkembang. Kedaulatan yang menentukan apakah suatu negara mampu mengatur kegiatan ekonomi di dalam negerinya dan hubungan ekonomi internasionalnya.¹³⁵

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting, yaitu kekuasaan itu

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, h. 254.

¹³⁵ *Ibid.* h. 247

terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan atau kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Asif Qureshi, mengemukakan empat (4) dalil mengenai kedaulatan internal. Pertama, suatu negara memiliki kedaulatan permanen terhadap kekayaan alamnya. Kedua, suatu negara memiliki kedaulatan terhadap kekayaan non-alamnya atau kegiatan ekonominya di dalam wilayah kekuasaannya, termasuk sumber daya manusia. Ketiga, suatu negara memiliki hak untuk memilih dan melaksanakan sistem ekonominya. Keempat, suatu negara memiliki kewajiban untuk tidak turut campur dalam urusan ekonomi negara lainnya melalui ancaman dan kekerasan.¹³⁶

Menurut Schrijver, dalam hal kedaulatan negara terhadap kekayaan alamnya, suatu negara memiliki hak untuk mengatur penanaman modal, termasuk pengaturan terhadap masuknya penanaman modal asing dan kegiatan para investor, termasuk aliran dana keluar penanaman modalnya.¹³⁷

Menurut Mahmud Siregar, pembatasan bidang usaha tidak dilarang dalam kesepakatan internasional di bidang perdagangan.¹³⁸

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka daftar negatif investasi pada Pasal 12 UUPM tidak bertentangan dengan aturan TRIMs. Perjanjian TRIMs tidak ditujukan untuk mengatur pembatasan bidang usaha. Perjanjian TRIMs

¹³⁶ *Ibid.* h. 247.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Mahmud Siregar, *op.cit.*, h. 27.

hanya mengatur kedisiplinan persyaratan pelaksanaan yang berdampak negatif pada kelancaran perdagangan barang.¹³⁹

4. Fasilitas Penanaman Modal

Melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia selaku anggota WTO, mengatur kebijakan penanaman modal yang lebih terbuka yang didasarkan pada kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk melaksanakan TRIMs. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) huruf d salah satu asas penanaman modal Indonesia adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun dalam negeri. Kebijakan utama yang harus disesuaikan adalah tentang penerapan fasilitas penanaman modal, yang wajib sesuai dengan aturan-aturan tentang persyaratan pelaksanaan yang disebutkan dalam lampiran TRIMs.¹⁴⁰

Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk menarik penanam modal. Undang-undang Penanaman Modal mengatur tentang fasilitas penanaman modal dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Fasilitas penanaman modal menjadi suatu permasalahan dalam hal fasilitas tersebut dikaitkan dengan pemenuhan *Performance Requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang dilarang dalam TRIMs.¹⁴¹

Dalam Pasal 18 UUPM disebutkan :

¹³⁹ *Ibid.* h. 26.

¹⁴⁰ *Ibid.* h. 27.

¹⁴¹ *Ibid.* h. 28.

Ayat (1) : “Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.”

Ayat (2) : “Fasilitas penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :

- a. Melakukan perluasan usaha; atau
- b. Melakukan penanaman modal baru;

Ayat (3) : “Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;

j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;¹⁴²

Secara umum tidak ada ketentuan perdagangan internasional yang melarang pemberlakuan insentif investasi dikaitkan dengan persyaratan pelaksanaan yang bertentangan dengan perjanjian TRIMs. Terkait dengan hal tersebut, menarik untuk diperhatikan ketentuan pasal 18 UUPM,¹⁴³ karena pada pasal tersebut terdapat dua kemungkinan keberatan penanam modal, khususnya PMA. *Pertama*, fasilitas penanaman modal tidak diberikan kepada semua penanam modal, akan tetapi hanya kepada penanaman modal yang memenuhi persyaratan tertentu. Dapat saja ketentuan diartikan sebagai ketentuan yang diskriminatif. *Kedua*, Pasal 18 ayat (3) huruf j mengkaitkan fasilitas penanaman modal dengan menggunakan produksi dalam negeri.¹⁴⁴

Persyaratan untuk memperoleh fasilitas dalam pasal 18 ayat (3) huruf a tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional, karena tidak ada ketentuan secara imperatif melarang persyaratan tersebut. Pemberian fasilitas yang dibatasi pada penanaman modal yang memenuhi syarat tertentu semestinya dipandang sebagai konsistensi pemerintah terhadap pandangan yang mengakui bahwa penerapan kebijakan penanaman modal tunduk pada kedaulatan politik Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Dalam pemaknaan yang demikian, syarat-

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 18.

¹⁴³ Mahmud siregar., *op.cit.*, h.28

¹⁴⁴ *Ibid.*

syarat tersebut adalah bentuk dari kebutuhan pembangunan ekonomi industri pada sektor industri.¹⁴⁵

Pasal 18 ayat (3) huruf j UUPM yang mengkaitkan fasilitas penanaman modal dengan penggunaan produksi dalam negeri kemungkinan akan mendapat perhatian investor asing. Fasilitas penanaman modal yang demikian dapat berdampak pada perdagangan internasional, karena pemberian fasilitas tersebut didasarkan pada syarat yang dapat berakibat ada perbedaan perlakuan antara barang buatan dalam negeri dengan barang impor. Dalam hal ini perlakuan diberikan kepada barang buatan dalam negeri dalam bentuk fasilitas penanaman modal, tidak diberikan kepada penanam modal yang menggunakan barang impor. Tentunya masih dapat diperdebatkan, mengingat bahwa pasal ini tidak mensyaratkan adanya kewajiban menggunakan barang buatan dalam negeri dalam jumlah, nilai atau persentase tertentu seperti yang dilarang dalam perjanjian TRIMs. Tindakan ini merupakan tindakan sukarela tetapi diberikan insentif investasi. Pasal 18 ayat (3) UUPM ini berlandung pada argumentasi tidak adanya kewajiban menggunakan barang buatan dalam negeri. Pasal 18 UUPM sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan suatu syarat opsi, yang artinya satu syarat terpenuhi maka menghapuskan kewajiban atas syarat yang lain.

Sementara itu Pasal 21 huruf a UUPM menyatakan :

¹⁴⁵ *Ibid.*

“Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah.”¹⁴⁶

Selanjutnya dalam Pasal 22 UUPM disebutkan :

“Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa :

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (Sembilan puluh Lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (Enam Puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (Tiga Puluh Lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (Delapan Puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (Lima Puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (Tiga Puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (Tujuh Puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (Empat Puluh Lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (Dua Puluh Lima) tahun.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *op.cit.*, Pasal 21 huruf a.

¹⁴⁷ *Ibid.* Pasal 22 Ayat (1)

Ayat (2) :“Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain :

- a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka waktu panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area luas;
- d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.”¹⁴⁸

Ayat (3) :“Hak atas tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.”¹⁴⁹

Ayat (4) : “Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus dimuka dan yang dapat diperbaharui sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat dihentikan atau

¹⁴⁸ *Ibid.* Pasal 22 Ayat (2).

¹⁴⁹ *Ibid.* Pasal 22 Ayat (3).

dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan”.¹⁵⁰

¹⁵⁰ *Ibid.* Pasal 22 Ayat (4).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penanaman modal menurut TRIMs pada prinsipnya melarang *performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang tidak sesuai dengan pasal III GATT tentang Perlakuan Nasional dan pasal XI GATT tentang Pembatasan Kuantitatif dalam peraturan penanaman modal, yaitu persyaratan menggunakan kandungan lokal (*local content requirement*) dan persyaratan keseimbangan (*trade balancing requirement*).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs. Pasal 18 ayat (3) huruf j Undang-Undang Penanaman Modal dalam hal ini dapat dikecualikan mengingat syarat diskriminasi tersebut dilakukan tidak secara spesifik dan hanya merupakan suatu pilihan bukan suatu keharusan yang memaksa untuk dilakukan.

B. Saran

1. Persyaratan pelaksanaan (*performance requirement*) yang ditetapkan dalam perjanjian TRIMs sebaiknya dapat disesuaikan dengan kondisi suatu negara khususnya negara sedang berkembang. Karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIMs, maka menjadi kewajiban

Indonesia untuk menerapkan aturan tersebut dalam undang-undang nasionalnya sepanjang yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

2. Merupakan kewajiban negara anggota yang telah meratifikasi segenap aturan TRIMs. Indonesia sebagai negara berkembang kadangkala masih menerapkan kebijakan-kebijakan perdagangan yang proteksionis untuk melindungi pengusaha dalam negeri dari persaingan perusahaan-perusahaan asing di dunia. Kebijakan-kebijakan penanaman modal boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO dan TRIMs. Pelaku usaha domestik harus lebih mempersiapkan diri untuk bersaing dengan pelaku usaha asing. Pelaku usaha tidak dapat berlindung terus dibalik pengecualian-pengecualian atau pembatasan-pembatasan terhadap penanam modal asing yang masih dibenarkan berdasarkan ketentuan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Beni Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009. Cet. Ke-1.
- Aminuddin ILmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004. Cet. Ke-1.
- Astim Riyanto, *World Trade Organization*, Bandung: YAPEMBO, 2003.
- Departemen dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HAKI, *Sekilas WTO*, Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HAKI, 2006.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2007. Cet. ke-III.
- G.Kartasapoetra, A.Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Bina Aksara, 1985. Cet. Ke-1.
- G. Rai Widjaja, *Penanaman Modal*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI-PRES, 1997.
- Harjono, K.Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Cet. Ke-1.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*, Bandung: Refika Aditama, 2006. Cet. Ke-1.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. Cet. Ke-1.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005. Cet. Ke-1.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005. Cet. Ke-1.
- Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Bandung: RajaGrafindo Persada, 2004. Cet. Ke-1.

- M. Soernarajah, *The Internasional Law on Foreign Investment*, 2004.
- Mahmul Siregar, *UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam Kegiatan Penanaman Modal*, (2006) 1 : 3, Jurnal Hukum Bisnis.
- Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Cet. Ke-1.
- Peraturan Presiden RI No 111 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Penanaman Modal.
- Perjanjian TRIMs.
- Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah*, (2006) 1:2, Jurnal Hukum Republika.
- Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. Cet. Ke-1.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008. Cet. Ke-1.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010. Cet. ke-II.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009. Cet. ke-11.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Internasional Mengenai Nasionalisasi di Indonesia*, Jakarta: UI-PRES, 2002. Cet. ke-1.
- UU RI No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.
- UU RI No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- UU RI No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Website Legalitas; <http://www.legalitas.org>.
- Website Pan Mohamad Faiz; <http://www.panmohamadfaiz.com>
- Website Telaga Hati; <http://www.telagahati.wordpress.com>
- Website Solusi hukum; <http://www.solusihukum.com>.

Website Education Feed Fury; <http://www.educationfeedfurry.com>.

Website Penanaman Modal; <http://www.penanamanmodal.com>.